

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Teori Strategi Politik

Strategi politik yaitu cara untuk mencapai tujuan politik tertentu. Taktik politik digunakan untuk mengambil atau mempertahankan kontrol, khususnya selama pemilihan umum. Taktik ini mirip dengan kampanye, yang bertujuan untuk memenangkan suara sebanyak mungkin dalam pemilihan untuk meraih kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin untuk mempromosikan kebijakan yang akan menguntungkan rakyat.<sup>1</sup>

Peter Schroder juga membahas tentang strategi politik, yang didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan nilai-nilai dengan tujuan memperoleh kekuasaan. Jenis-jenis strategi politik yang disebutkan oleh Schroder adalah sebagai berikut;

##### a. Strategi Ofensif

Strategi ofensif (menyerang) biasanya digunakan oleh partai yang ingin menambah jumlah pemilih. Jika lebih banyak orang yang memiliki opini positif terhadap partai sebelumnya dibandingkan dengan partai saat ini, maka kampanye tersebut dianggap berhasil. Perbedaan yang nyata harus dibuat dalam strategi ofensif kampanye pemilu untuk menarik pemilih dan pendukung partai oposisi.<sup>2</sup>

Strategi ofensif dibagi menjadi dua yaitu, strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Pertama, Strategi perluasan pasar selain basis permanen yang ada saat ini, strategi pertumbuhan pasar berupaya untuk membangun basis cadangan kelompok pemilih baru. Taktik ini juga digunakan dalam kampanye untuk menarik perhatian dan mendidik masyarakat tentang manfaat dari inisiatif ini dan politisi yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Kedua, strategi menembus pasar adalah dimana partai mencoba menggali potensi kandidat yang telah dipilih oleh partai untuk memaksimalkan potensi tersebut. Bakat yang dimiliki calon, seperti kepiawaiannya berbicara di depan umum, berorganisasi, mengelola komunitas, dan sebagainya, harus digali potensinya. Selain itu, hal ini dapat dicapai dengan melihat target pemilih yang sudah berhasil.. Selain itu juga dapat dilakukan melalui metode eksplorasi target pemilih dimana dalam keberhasilannya sebelumnya sudah diperoleh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik, terj. Aviantie Agoesman* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2013), 186.

<sup>2</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik, terj. Aviantie Agoesman*, 186.

<sup>3</sup> Gunawan, Bainus, Paskarina, *Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah : Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017*, Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol : 3, No. 1, (2020), 58-59.

Menurut Schroder, dua pola strategi ofensif ini memiliki karakteristik berikut;

- 1) Selalu berusaha menunjukkan perbedaan yang jelas dan menarik terhadap lawan politik yang ingin diambil alih pemilihnya
- 2) Selalu menekankan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh pihak yang mendukungnya.
- 3) Selalu berusaha menawarkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki pesaing.
- 4) Senantiasa berusaha untuk menyempurnakan program pesaing.
- 5) Selalu menjanjikan transformasi

Keberhasilan taktik ofensif lain mencapai tujuannya adalah bergantung pada kemampuan menciptakan senjata yang dibutuhkan untuk menyerang lawan. Khususnya dalam hal kapasitas untuk mengorganisir masyarakat dalam menanggapi kemungkinan dan bahaya dari luar.<sup>4</sup>

b. Strategi Defensif

Strategi defensif yaitu strategi yang digunakan untuk mempertahankan pasar, menutup pasar, atau menyerahkan pasar jika ada pihak yang ingin mempertahankan dominasinya atau mempertahankan pangsa pasar agar tetap eksis dan tidak mengurangi kekuatannya. Dalam strategi pertahanan pasar, partai-partai yang mendukung pemerintah berupaya membujuk para mantan pemilih musiman untuk memberiklan suara mereka, sekaligus berusaha mempertahankan pemilih untuk tetap teguh pada pilihan mereka.<sup>5</sup>

Sementara itu, ada dua definisi dari strategi penjualan dan penjualan pasar. Pertama, satu pihak ingin menyerah, dan kadang-kadang bergabung dengan pihak lain. Meskipun hal ini jarang terjadi, penyerahan pasar waktu kepada pihak ketiga lebih sering terjadi dalam strategi kedua, yaitu pemilu yang menggunakan kertas suara. Dalam strategi kedua, kandidat-kandidat terkuat yang menang dalam tahap pertama pemilihan hanya dapat mengikuti pemungutan suara putaran kedua.<sup>6</sup>

Strategi defensive diantaranya:

- 1) *Denial* (Penyangkalan) yaitu menyangkal bahwa tindakan itu terjadi atau bahwa mereka berperan dalam melakukannya. Ada dua jenis penyangkalan, yang pertama adalah penyangkalan sederhana misalnya mengatakan bahwa kita tidak melakukan sesuatu. Kedua, penyangkalan *Shifting the Blame* di mana kita menyangkal atau mengalihkan kesalahan pada orang lain.

---

<sup>4</sup> Sidarta GM, *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*. (Jakarta : Kalam Indonesia, 2013). 34

<sup>5</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik*, terj. Aviantie Agoesman (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2013), 190.

<sup>6</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik*, terj. Aviantive, 191.

- 2) *Evading Responsibility* (Mengabaikan tanggung jawab). Ketika seseorang tidak dapat menyangkal melakukan sesuatu, organisasi dapat berusaha untuk menghentikannya dari melakukannya. Ini dapat ditafsirkan sebagai cara baginya untuk menghindari tanggung jawab atas perilakunya. Kegiatan ini mencoba untuk mengurangi mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>7</sup>

Berbeda dengan strategi ofensif, partai yang menggunakan strategi defensif cenderung berusaha untuk menghilangkan perbedaan ini sehingga pemilih tidak dapat membedakan mereka. Namun, dalam situasi tertentu, kedua pendekatan ini biasanya digunakan bersamaan.<sup>8</sup>

Selain itu, strategi defensif digunakan melalui berbagai tindakan, seperti:

- a. Menjaga dan memelihara pemilih tetap serta memperkuat solidaritas pemilih agar lawan politik tidak mudah mengambilnya.
- b. Meningkatkan pemahaman pemilih tentang program-program yang telah mereka anggap berhasil sebelumnya.
- c. Mencoba melakukan operasi disinformasi, yaitu mengaburkan perbedaan dengan lawan politik.

Menurut Tjiptono dan Chandra, Strategi politik terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut :<sup>9</sup>

1) *Segmentasi*

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi beberapa kelompok yang memiliki kebutuhan, preferensi, perilaku, dan tanggapan yang sama terhadap inisiatif pemasaran tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi unit-unit pasar yang homogen.

2) *Targetting*

Targetting digunakan untuk menetapkan maksud atau tujuan yang harus dicapai secara obyektif, penargetan ini digunakan dalam strategi politik. Penargetan juga membantu untuk fokus pada isu-isu politik saat ini dan mengatasinya. Targeting menurut Tjiptono dan Chandra adalah proses menganalisis, menemukan, dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang sejalan dengan tujuan suatu bisnis atau partai politik.

3) *Positioning*

Positioning, menurut Tjiptono dan Chandra, juga tidak bisa dilepaskan dari strategi politik. Hal ini dikarenakan positioning merupakan salah satu ciri yang membedakan suatu organisasi atau

---

<sup>7</sup> J. Salusu, *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah*. (Jakarta : Prenada Media, 1996).

<sup>8</sup> Budiman Adi Subiakto, *Strategi Defensif an Ofensif Parpol Berbasis Massa Islam dalam Mencapai Parliamentary Threshold pada Pemilu 2014*, SHAHIH, LP2M IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, (2016), 143.

<sup>9</sup>Tjiptono, F & Chandra, G. . *Pemasaran Strategik (2th ed.)*.( Yogyakarta: Andi. 2012)

orang dengan organisasi atau orang lainnya, khususnya dengan menanamkan produk di benak pelanggan pada segmen tertentu melalui komunikasi.<sup>10</sup>

Ada langkah-langkah awal yang penting untuk diselesaikan ketika merancang strategi. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan pada tahap ini, atau yang sering disebut dengan ‘SWOT Analysis’. Menurut Wheelen dan Hunger, analisis strategi yang efektif bergantung pada logika yang dapat mengoptimalkan kekuatan (strength) dan peluang (*weakness*). Namun, dia juga mampu mengurangi kelemahan (*opportunities*) dan ancaman (*Threat*). Analisis lingkungan intern menunjukkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis lingkungan ekstern menunjukkan peluang dan ancaman.<sup>11</sup>

Dengan mengelompokkan kondisi dan situasi daerah pemilihan sasaran yang akan memudahkan dalam melakukan tindakan, maka tujuan strategi secara keseluruhan adalah untuk memperoleh informasi awal dalam melakukan kegiatan untuk mempertahankan eksistensi atau kegiatan untuk mempersiapkan kegiatan pemilu atau kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat. perhatian masyarakat. Untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan mobilitas sarana, prasarana, dan akomodasi yang harus dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait, maka dapat diketahui secara tepat kemungkinan lokasi atau tempat yang dapat terkena dampak sebagai wilayah sasaran utama. Efektivitas operasional atau kebijakan partai politik sangat ditentukan oleh strateginya.<sup>12</sup>

## 2. Teori Partai Politik

Partai politik adalah komponen penting dari demokrasi, seperti yang ada di Indonesia saat ini. Karena partai politik memainkan peran penting dalam masyarakat demokratis, bahkan keyakinan ekstrem mengklaim bahwa tidak mungkin ada demokrasi ketika tidak ada partai politik. Penduduk akan merasa memiliki negara atau pemerintahan jika partai politik ada karena ketika tidak ada pengawasan terhadap penguasa, kemungkinan besar kewenangan tersebut akan hilang. Partai politik, seperti yang didefinisikan oleh Carl J. Friedrich, yakni kumpulan individu yang dibentuk secara formal dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan kontrol pemerintah untuk pemimpin partai mereka dan, atas dasar kekuasaan ini, menawarkan anggota partai yang masuk akal dan keuntungan substansial.<sup>13</sup>

Menurut Ichlasul Amal, partai politik yaitu kebutuhan politik kontemporer yang demokratis. Tujuan partai politik sebagai sebuah organisasi seharusnya untuk mengaktifkan serta memobilisasi massa, menawarkan platform untuk sudut pandang yang berbeda, dan

<sup>10</sup> Tjiptono, F & Chandra, G. . *Pemasaran Strategik (2th ed.)*.( Yogyakarta: Andi. 2012)

<sup>11</sup> Mohamad Harisudin, *Metode Penentuan Faktor-Faktor Keberhasilan Penting Dalam Analisis Swot*, A grisaintifika Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Vol. 3, No. 2, 2019, 112

<sup>12</sup> Puji Kurniawan, *Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah ; Studi Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018*, Jurnal AlMaqasid, Vol 6 (2), Juli-Desember 2020, 247 – 248.

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 404

memfasilitasi transfer kekuasaan yang sah dan damai. Partai politik dalam definisi kontemporer adalah organisasi yang mengusulkan calon pejabat publik dalam upaya untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan pemerintah.<sup>14</sup> Partai politik adalah kelompok canggih dari pemain politik yang terlibat secara sosial yang berjuang untuk kepentingan publik dengan berkonsentrasi pada pembatasan otoritas pemerintah. Oleh karena itu, partai politik berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan kekuatan dan kepercayaan masyarakat dengan struktur pemerintahan yang mapan dan dengan tindakan politik dalam komunitas politik yang lebih besar. Menurut Neumann, dalam pengertian seperti itu, kata "partai politik" selalu mengandaikan adanya sistem politik yang demokratis; namun, ketika istilah tersebut digunakan dalam negara otoriter, itu adalah istilah yang kontradiksi.

Peran partai politik adalah sebagai perantara gagasan dalam rangka komunikasi *top-to-bottom*. Partai politik mengambil bagian dalam kegiatan ini dengan berdebat dan mengkomunikasikan niat dan kebijakan pemerintah. Partai berfungsi sebagai wahana sosialisasi politik dalam konteks komunikasi dari atas ke bawah. Partai politik melayani tujuan ini dengan memupuk cita-cita ideologis dan loyalitas partai dan negara. Jika sosialisasi politik memenuhi tujuannya dengan baik, itu akan memperkuat identitas nasional dan mempromosikan integrasi dalam skala global.

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik dapat mengurangi dampak merugikan dari perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, status sosial ekonomi, atau agama dalam peran manajemen konflik.<sup>15</sup> Partai politik dikutip oleh David Easton sebagai salah satu pengatur permintaan dalam teori sistemnya. Menurut Easton, sifat dari regulator tuntutan ini akan berdampak signifikan terhadap output yang dihasilkan dari input yang masuk ke dalam sistem. Sifat partai sangat mempengaruhi input yang akan diolah dalam sistem politik sehubungan dengan peran partai. Dengan kata lain, fitur partai memiliki dampak yang signifikan terhadap keluaran pemrosesan sistem.<sup>16</sup>

Sesuai dengan pengertian yang telah diberikan di atas, maka partai politik yaitu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat berlandaskan keyakinan tentang cita-cita masyarakat yang ditujunya. Selanjutnya, melalui pembentukan pengaruh dalam politik, organisasi digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal secara legal. Memiliki otoritas ini akan memudahkan mereka untuk memberlakukan kebijakan yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang mereka impikan.

---

<sup>14</sup> Heinz Eulau, *Micro-Macro Political Analysis: Accents on Inquiry*, Chicago, Illinois: Aldine Publishing Comp, 1969, 204-215.

<sup>15</sup> Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutahir Partai Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2007, i-x

<sup>16</sup> David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Toronto: The Prentice Hall of Canada, 122- 123



### 3. Fungsi Partai Politik

Ada beberapa fungsi partai politik, diantaranya yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Sosialisasi politik yakni proses di mana individu masyarakat mengembangkan pandangan dan orientasi politik mereka. Masyarakat dididik tentang politik dan instrumennya sebagai hasil dari proses sosialisasi politik ini.
- b. Rekrutmen politik yakni penunjukan seseorang atau kelompok guna mengisi satu atau lebih jabatan dalam sistem politik dan pemerintahan pada khususnya. Ada dua mekanisme yang digunakan dalam rekrutmen politik<sup>18</sup>:
  - 1) Rekrutmen terbuka, memungkinkan pengetahuan yang luas tentang kondisi dan pedoman untuk menggambarkan karakter. Dalam situasi ini, partai politik berfungsi sebagai kendaraan elit politik yang mampu merebut hati rakyat.
  - 2) Rekrutmen tertutup, berkebalikan dengan rekrutmen terbuka. Kriteria dan persyaratan pencalonan tidak dapat dipublikasikan dalam perekrutan tertutup. Partai menampilkan dirinya sebagai promotor utama yang berasal dari dalam partai. Pembacaan menyeluruh terhadap isu rekrutmen politik dapat memberikan pencerahan tentang berbagai dinamika partai politik<sup>19</sup>:
    - 1) Rekrutmen politik dapat mengungkap basis kekuatan partai politik.
    - 2) Perebutan kekuasaan internal partai politik disebut sebagai rekrutmen politik.
    - 3) Rekrutmen ke dalam politik dapat menunjukkan politik perwakilan yang berusaha dipromosikan oleh partai politik.
    - 4) Rekrutmen politik menjelaskan pergerakan elit.
    - 5) Citra publik partai ditentukan melalui rekrutmen politik.
    - 6) Faktor kunci dalam mengidentifikasi jenis partai adalah rekrutmen politik.
- c. Nasihat kepentingan adalah proses memperhitungkan, memeriksa, dan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang seringkali bersaing menjadi alternatif kebijakan umum. Alternatif-alternatif ini kemudian diperjuangkan sepanjang perumusan dan pelaksanaan pilihan-pilihan politik. Peran mengarahkan kepentingan mengacu pada hal ini.
- d. Komunikasi politik yakni cara pemerintah dan masyarakat berbagi informasi tentang politik kepada publik. Ketika datang ke pemerintah, pengetahuan sangat penting karena pengetahuan ini akan memungkinkan pemerintah ini untuk terus berkuasa.

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992) 166.

<sup>18</sup> Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 209.

<sup>19</sup> Sigit pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia* (Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism, 2011) 90-91

- e. Pengendalian konflik, yakni di mana artai politik yang merupakan lembaga demokrasi, berupaya membatasi konflik dengan melakukan komunikasi dengan pihak lawan dan mengemukakan masalah dalam diskusi dengan wakil rakyat.
- f. Kontrol politik adalah proses menyoroti kekurangan, kelemahan, dan ketidakakuratan dalam teks kebijakan atau dalam cara kebijakan yang dibuat pemerintah dijalankan. Pemerintah menghasilkan kebijakan, dan kebijakan tersebut kemudian akan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Kontrol partai politik sekarang melayani tujuannya dalam bereaksi terhadap kebijakan pemerintah tentang kekurangan saat ini dan menentukan bagaimana nilai-nilai kebijakan akan didistribusikan.
- g. Kaderisasi partai politik, di mana kader-kader yang terpilih menjadi inti dari kelompok yang lebih besar di dalam partai politik, adalah kelompok manusia terbesar karena mereka terstruktur secara konsisten. partai politik menggunakan kaderisasi, proses pengajaran yang panjang, untuk memaksimalkan potensi dari kader supaya melahirkan kader yang unggul.
- h. Keterlibatan politik merupakan komponen penting dari demokrasi dan memiliki implikasi yang signifikan bagi demokrasi. Demokrasi akan kehilangan tujuan fundamentalnya jika tidak ada partisipasi. Menurut Huntington, keterlibatan politik adalah perilaku orang yang dimaksudkan untuk berdampak pada pengambilan keputusan pemerintah.<sup>20</sup> Manusia benar-benar diberi kesempatan untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi, baik pada saat pemilu maupun melalui kegiatan lain seperti musyawarah, pawai, dan lain sebagainya. Partisipasi warga sangat penting karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah, apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat atau pemerintah daerah, akan berdampak signifikan pada masa depan mereka.

#### 4. **Pemikiran Politik dalam Islam**

##### a. **Kepemimpinan dalam Islam**

Kepemimpinan dalam Negara Islam sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah dauliyah (negara) tidak pernah disinggung dalam Al-Quran, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan di dalamnya. Konsep kepemimpinan dalam Negara Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' AI-Rosyidin.

---

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 308.

Bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya.<sup>21</sup>

Kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudannya dan memiliki aturan-aturan yang khasanah. Namun dalam fakta sejarah tidak sedikit pemimpin yang menghalalkan segala cara dalam meraih kursi kepemimpinannya. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Ramburambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab. Tetapi hal itu hanya menjadi bagian dari retorika politik. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an terdapat dalam Qs Shad: 26

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : *(Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."*<sup>22</sup>

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memerintahkan khalifah(penguasa) besikap adil dan jangan selalu mengikuti hawa nafsu yang akan membawa dalam hal kesesatan dan menadapatkan azab dihari perhitungan. Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada 4 abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik Islam. Agama Islam oleh pemeluknya diyakini akan dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat mental spiritual maupun fisik material. Oleh karena itu, agama selalu dilibatkan oleh para pemeluknya untuk merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya, sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan. Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara

<sup>21</sup>Armedi, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi*, (Jurnal Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung; 2022). 5-7

<sup>22</sup> Terj. QS: Shad ayat 26



hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar maruf nahi mungkar. Fiqh Siyasa adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.

#### **b. Pemikiran Politik Al Mawardi**

Pemikiran Politik Al Mawardi konstalasi politis yang bergoliat di zaman al-Mawardi berada dalam keadaan yang carut marut, mirip zaman yang dihadapi oleh al-Farabi. Meski demikian, kedua tokoh ini menggunakan pola dan cara yang berbeda dalam menjawab tantangan tersebut, alFarabi dengan kekuatan nalar filosofisnya meresolusi fakta tersebut dengan pendekatan yang sangat sempurna, meski demikian pengejawantahan ide-idenya secara kultural tidak dapat terealisasi, sementara kekhasan al-Mawardi pada posisi ini ialah memformulasi sebuah gerakan politis sebagai respon terhadap fakta dengan mempertahankan status quo (Bahasa Latin yang bermakna keberadaan negara), stressingnya bahwa seorang khalifah harus berbangsa Arab dan berasal dari suku Quraisy, demikian halnya dengan para pembantu kekhalifan.<sup>23</sup>

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi rabi", Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu serta mengadakan kerja sama. Dengan kata lain, sebab lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupan dua dimensi dari misi kenabian.

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatic kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembangaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya Negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu

---

<sup>23</sup> Armedi, *Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi*, (Jurnal Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung; 2022). 5-7

komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya merekapun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhilafahan. Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu Kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain.<sup>24</sup>

## 5. Teori Pemilihan Umum (PEMILU)

### a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih, menyuarakan pikirannya, dan mengambil bagian sebagai elemen penting negara dalam menentukan arah bangsa. Hak-hak rakyat Indonesia dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia. Nasib bangsa dan negara ditentukan berdasarkan hak tersebut, salah satunya adalah aktif menggunakan hak pilihnya. PKPU menyatakan bahwa prinsip-prinsip berikut harus mengatur pemilu: ketidakberpihakan, kejelasan hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945, rakyat memiliki kewenangan untuk memilih bentuk dan menjalankan pemerintahannya. Menurut ketentuan UUD, rakyat dan lembaga negara antara lain menjalankan kedaulatannya melalui proses pemilihan umum yang digariskan dalam Pasal 22E UUD 1945.

Selain itu, pemilihan umum dapat dilihat sebagai mekanisme penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Pemilu dapat menjadi wahana untuk mengubah tujuan politik partai menjadi peraturan nasional. Kedaulatan rakyat seringkali terbukti tidak memadai dalam praktiknya, bahkan di negara dengan jumlah penduduk yang kecil dan wilayah yang terbatas. Dapat dikatakan bahwa sulit untuk meminta masukan setiap individu ketika memutuskan arah pemerintahan, terutama di negara-negara dengan populasi besar dan wilayah yang luas. Selain itu, dalam budaya kontemporer seperti kita, kualitas hidup berkembang dengan cara yang sangat rumit dan dinamis, dengan individu dengan berbagai tingkat kecerdasan dan tingkat spesialisasi tenaga kerja yang cenderung meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Akibatnya, sulit untuk mempraktekkan kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Karena rumitnya masalah ini, sistem perwakilan harus digunakan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Armedi, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi*, (Jurnal Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung; 2022). 5-7

<sup>25</sup> Jimly A, *PARPOL dan PEMILU sebagai instrument Demokrasi*, (JURNAL KONSTITUSI; Vol.3 No.4) 90

### b. Pentingnya Pemilihan Umum

Pentingnya pemilihan umum karena beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Keyakinan atau keinginan orang tentang berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat secara keseluruhan bersifat cair dan berubah sepanjang waktu. Ada kemungkinan bahwa sebagian besar individu pada akhirnya akan berubah pikiran tentang kebijakan negara setelah jangka waktu tertentu berlalu.
- 2) Pendapat rakyat bisa berubah, begitu pula dengan kondisi koeksistensi masyarakat, baik akibat dinamika domestik maupun internasional, serta unsur manusia baik internal maupun eksternal.
- 3) Kenaikan populasi dan proporsi orang dewasa juga memungkinkan ambisi dan sikap orang untuk berubah. Mereka tidak selalu memiliki pola pikir yang sama dengan orang tuanya, terutama pemilih muda atau pemula.
- 4) Untuk memastikan bahwa lengan eksekutif dan legislatif sering diganti, pemilihan umum harus diadakan secara teratur. Proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara rutin diperlukan untuk memberikan transfer kekuasaan yang tertib, menjamin demokrasi dan memungkinkan pemerintahan yang benar-benar mewakili dan melayani kepentingan seluruh warga negara untuk beroperasi dengan sukses dan efisien. Kesejahteraan dan keadilan dapat dicapai semaksimal mungkin dengan jaminan sistem demokrasi yang tertata dengan baik.<sup>26</sup>

Pemilihan umum juga harus diadakan secara teratur atau pada interval yang telah ditentukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam memilih kebijakan negara bagian dan federal, termasuk pemilih terdaftar dan pemilih pemula. Karena itu, beberapa negara, seperti Indonesia, mengamankan pemilihan umum dilakukan setiap lima tahun sekali.

Di negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, pemilu juga dapat diselenggarakan secara lebih teratur sesuai kebutuhan. Pilihan lain untuk menyalurkan hak-hak dasar rakyat adalah melalui kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan sesuai dengan jadwal konstitusional yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak asasi warga negara. Sependapat dengan gagasan perusakan rakyat yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka segala persoalan yang berkaitan dengan pemilihan umum itu sendiri harus dikembalikan kepada rakyat. Jika pemerintah tidak memastikan terselenggaranya pemilihan umum, menunda pemilihan umum tanpa izin rakyat, atau tidak melakukan tindakan lain yang mempersulit penyelenggaraan pemilihan umum. Legalitas dan legitimasi pemerintah memainkan peran penting dalam demokrasi kontemporer.

---

<sup>26</sup> Jimly A, *PARPOL dan PEMILU sebagai instrument Demokrasi*, 90-121

Agar suatu pemerintahan dianggap sah, ia harus didirikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konstitusi. Akan tetapi, pemerintah juga harus sah dalam arti harus dipercaya selain sah. Tidak diragukan lagi akan ada skeptisisme jika suatu pemerintah mengklaim mewakili rakyat untuk memenuhi syarat sebagai demokratis meskipun pembentukannya tidak ditentukan oleh hasil pemilihan umum. Artinya, setiap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang seolah-olah didirikan oleh rakyat, pada kenyataannya harus tunduk pada temuan-temuan pemilihan umum sebagai pilar di dalam sistem demokrasi modern.<sup>27</sup>

**B. Tujuan PEMILU**

Diadakannya PEMILU tentu karena adanya tujuan, Ada empat tujuan diselenggarakannya pemilihan umum:

- 1) Untuk memperlancar peralihan kekuasaan secara damai dan tertib.
- 2) Untuk memungkinkan digantinya wakil-wakil kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan.
- 3) Untuk menerapkan gagasan kedaulatan rakyat.
- 4) Untuk menerapkan gagasan tentang hak asasi warga negara.<sup>28</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No .	Nama dan Tahun	Judul	Metode/Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Vikri Wanto, 2014	<i>Strategi Pemenangan Partai Politik Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong sebagai penelitian lapangan.	Berbagai taktik dilakukan Partai Golkar Nagan Raya untuk memenangkan pemilu 2014. Untuk membangun citra politik yang baik dan memahami tantangan yang dihadapi Partai Golkar Nagan Raya dalam memenangkan

<sup>27</sup> Jimly A, *PARPOL dan PEMILU sebagai instrument Demokrasi*, 90-121

<sup>28</sup> Jimly A, *PARPOL dan PEMILU sebagai instrument Demokrasi*, 90-121

				<p>pemilu tahun 2014, strategi yang digunakan adalah dengan mulai terlibat dalam kegiatan sosial, memasang baliho, spanduk, iklan radio, dan kampanye sosialisasi dan pendidikan politik. simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus.<sup>29</sup></p>
<p><b>Persamaan</b> Sama-sama membahas terkait Strategi partai dalam menyongsong PEMILU.</p> <p><b>Perbedaan</b> Pada penelitian tersebut membahas Strategi partai GOLKAR sedangkan penelitian saya membahas strategi dua partai agar dapat dijadikan perbandingan</p>				
2	<p>Fahmy Iss Wahyudy, Widya Setiabudi Sumadinata, Leo Agustino. 2021</p>	<p>STRATEGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM MEMENANGKAN SUARA PEMILIH MINORITAS PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong sebagai penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada partai PSI.</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi citra dan narasi sebagai partai yang anti intoleransi dan pro keberagaman inilah yang berujung pada signifikansi</p>

<sup>29</sup> Gunawan, Arry Bainus, dan Caroline Paskarina, *Strategi Politik Sosialisasi Partai Dalam Pemenangan PASLON Kepala Daerah : Studi Kasus Pada PILKADA Kabupaten Nagari Raya Tahun 2017*, Jurnal POLITEA vol. 3, No. 1 (2020), 68.



			<p>perolehan suara DPD PSI Kota Bandung. Padahal hal tersebut tidak lepas dari latar belakang gelombang politik yang sedang berkecambah yang cenderung mempolarisasikan politik di tingkat nasional dan lokal ke arah agama. Fakta bahwa ketiga daerah pemilihan ini memiliki basis pemilih minoritas yang cukup besar dikaitkan dengan terpilihnya tiga calon anggota parlemen PSI Kota Bandung. Terobosan yang dapat meningkatkan reputasi baik PSI di kalangan pemilih adalah penggunaan berbagai teknik kampanye dengan aspek kreatif berbasis digital melalui pembuatan website partai</p>
--	--	--	---

				dan media sosial. <sup>30</sup>
<p><b>Persamaan</b> Sama-sama membahas terkait Strategi partai dalam menyongsong PEMILU.</p> <p><b>Perbedaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada penelitian tersebut membahas Strategi partai PSI sedangkan penelitian saya membahas strategi dua partai agar dapat dijadikan perbandingan.</li> </ul>				
3	Pardomuan, Adji Suradji Muhammad, Nazaki. 2022	STRATEGI PARTAI NASDEM DALAM PEMENANGAN PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI : PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KOTA TANJUNGPINANG)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong sebagai penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada partai NASDEM.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tergantung pada strategi politik yang digunakan, strategi kemenangan Partai NasDem Tanjungpinang pada tahun 2019 cenderung lebih bersifat ofensif (menyerang) dengan menyusup ke basis pemilih lawan politiknya, yakni partai politik yang mencalonkan diri. Pemilu 2019, dengan menggunakan teknik strategi politik. <sup>31</sup>
<p><b>Persamaan</b> Sama-sama membahas terkait Strategi partai dalam menyongsong PEMILU.</p> <p><b>Perbedaan</b></p>				

<sup>30</sup> Fahmy Iss Wahyudy, Widya Setiabudi Sumadinata, Leo Agustino, *Strategi Partai Solidaritas Indonesia dalam Memenangkan Suara Pemilih Minoritas Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019*. Jurnal civic Hukum, vol. 6, No. 1 (2021), 104.

<sup>31</sup> Pardomuan, Adji Suradji Muhammad, Nazaki, *Strategi Partai NASDEM Dalam Pemenangan PEMILU Tahun 2019 di Kota Tanjungpinang (Studi : Pemilihan Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang)*, Student online jurnal, Vol. 3No. 1 (2022).

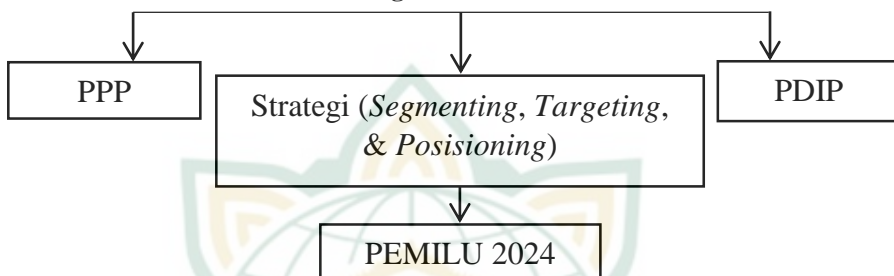
Peneitian saya membahasas strategi dua partai agara dapat dijadikan perbandingan.

**D. Kerangka Berfikir**

Berikut ini adalah gambaran dari kerangka berfikir dalam penelitian ini

:

**Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir**



**Keterangan;**

Untuk memahami dan memahami strategi politik Partai PPP dan PDIP, kita harus melihat sumber masalahnya, yaitu Pemilu 2024. Untuk mencapai tujuan mereka, Partai PPP dan PDIP harus melakukan perubahan strategi secara konsisten. Dalam hal ini, Partai PPP dan Partai PDIP harus menganalisis pasar, target, dan posisi masing-masing untuk membuat strategi pemasaran yang efektif untuk pemilihan umum 2024. Oleh karena itu, selama analisis, peneliti harus mengetahui kondisi segmentasi, tujuan, dan posisi Partai PPP dan PDIP. Hal ini diperlukan agar peneliti dapat menganalisis strategi pemasaran Partai PPP dan PDIP